

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**

**NOMOR 05 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah, dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

/Mengingat.....

/5. Undang-.....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

/9. Undang-.....

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);

/14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG**

dan

**BUPATI TABALONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN.

/BAB I.....

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
5. Penambahan Penyertaan Modal adalah Nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Deviden adalah keuntungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang.
8. Bank BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
9. Kas Daerah adalah kas milik Pemerintah Daerah.

/BAB II.....

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Bank BPD sampai Tahun 2009 sebesar Rp. 11.902.314.709,- (sebelas milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Bank BPD sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

/a. pada.....

- a. pada tahun 2010 ditetapkan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- b. pada tahun 2011 ditetapkan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank BPD.

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah pada Bank BPD berupa deviden yang diperoleh selama Tahun Buku Bank BPD menjadi hak Daerah.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

/BAB VI.....

- 9 -

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Juli 2010

**BUPATI TABALONG**

Cap.     ttd.

**H. RACHMAN RAMSYI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG**

Ttd.

**H. ABDEL FADILLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2010 NOMOR 05

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 05 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA**  
**PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KALIMANTAN SELATAN**

**I. UMUM.**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 huruf a angka 3), bahwa Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan Pasal 173 ayat (1), bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik Swasta serta Pasal 173 ayat (2), bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.  
Maka dalam rangka menunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank BPD yang ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.

/2. Peraturan.....

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75, pengelolaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
3. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah supaya lebih efektif dan efisien maka ditetapkan jumlahnya sekaligus untuk beberapa tahun, sehingga tidak setiap tahun menyusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 03